

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**



021-70760947



www.pulauseribu.jakarta.go.id



Jalan Ikan Barakuda No .14
Pulau Pramuka

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2021 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

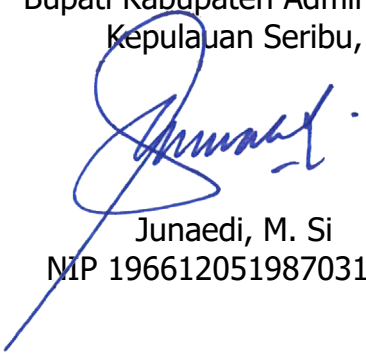
Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diharapkan

dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 31 Januari 2022
Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Junaedi, M. Si
NIP 196612051987031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berusaha melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, memiliki kinerja yang jelas dan terukur.

Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2021, seperti pada tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	85	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	86	87,72	100%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91%	92,23%	100%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100%	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nomor 38)	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 51)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (Nomor 51)	100%	100%	100%
8	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 52)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (Nomor 52)	100%	100%	N/A
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemerintahan (Nomor 61)			
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Nomor 66)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	100%	100%	100%
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	88,41%	88,41%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional baadn pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3 (100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	WTP	WTP	WTP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			masing-masing. Diskominfoitk menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfoitk per triwulan. d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.			
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	81	94,22	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%	100%	100%
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	93	89,81	96,57%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur dikarenakan penilaian oleh Kementerian PAN RB belum keluar dan 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai.

Pada Tahun 2021 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai 19 (sembilan belas) program dengan pagu anggaran sebesar Rp 114.406.409.262 dan terealisasi sebesar Rp 109.412.426.944 maka capaian pada Tahun 2021 sebesar 92,23%

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya antara lain :

1. Peningkatan infrastruktur menjadi faktor untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai Destinasi Pariwisata Dunia dan mendukung peningkatan minat kunjungan Pariwisata di Kepulauan Seribu;
2. Masih lemahnya kinerja di bidang pelayanan kepariwisataan dan transportasi laut;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, beberapa upaya perlu dilakukan adalah:

1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia;
2. Melakukan penyuluhan tentang peraturan-peraturan di bidang Pemanfaatan Ruang Kota, Transporatasi, Pariwisata dan Kebersihan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan, monitoring langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT/RW, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xiii
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	2
Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	3
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.....	5
Pernyataan Visi	9
Pernyataan Misi	10
Permasalahan Utama	10
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2021	12
Perencanaan Pembangunan Daerah	12

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	21
Capaian Kinerja	21
Analisis Efisiensi Sumber Daya	41
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	48
Realisasi Anggaran	47
Bab 4 : Penutup	65
Kesimpulan	66
Saran	66
Tindak Lanjut	67
Lampiran-lampiran	68

BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik / *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ stakeholder) Kepulauan Seribu. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Kepulauan Seribu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun-ketahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan

masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengukur semua program satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
11. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 98 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, dan lain –lain.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25' – 106°4'BT dan 5°24' – 5°45'LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 13 (tiga belas) suku dinas, 3 (tiga) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 28.224 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.717 jiwa per km². Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

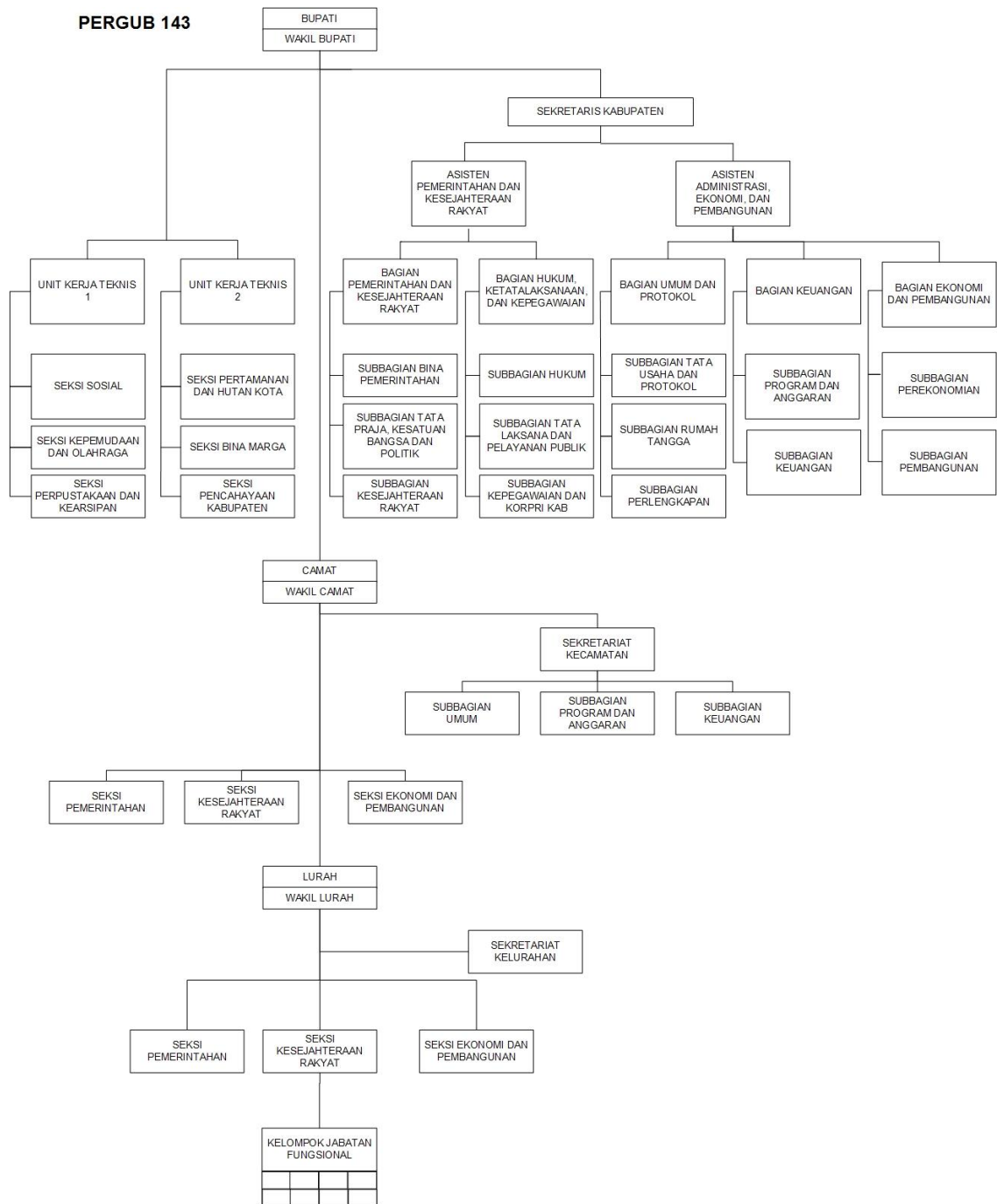
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1. Subbagian Bina Pemerintahan
 2. Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Subbagian Kesejahteraan Rakyat.
- b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Hukum
 - 2) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - 3) Subbagian Kepegawaian dan KORPRI Kabupaten.
2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol
 - 2) Subbagian Rumah Tangga
 - 3) Subbagian Perlengkapan.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Anggaran
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perekonomian
 - 2) Subbagian Pembangunan.
4. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
 - a) Seksi Sosial
 - b) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
5. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
 - b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
 - c) Seksi Bina Marga
6. Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran

- 3) Subbagian Keuangan
 - b) Seksi Pemerintahan
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e) Kelurahan, terdiri dari
 - 1) Lurah
 - 2) Wakil Lurah
 - 3) Sekretariat Kelurahan
 - 4) Seksi Pemerintahan
 - 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

PERGUB 143



Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Sebagai suatu lembaga pemerintah, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus dapat menjadi suatu lembaga yang handal di dalam melaksanakan peran strategis dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Peran strategis koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ditandai dengan semakin berdaya guna dan berhasil gunanya penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan peran strategis pengawasan, pemantauan, dan penilaian ditandai dengan terjadinya pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah didukung oleh sumber-sumber pendanaan baik pemerintah, maupun non pemerintah (swasta) yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada gilirannya semua keberhasilan pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut akan dapat terindikasi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu secara signifikan.

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Kondisi Pandemi Covid-19 di Tahun 2021 yang membuat semua sektor terkena dampaknya.

2. Terbatasnya ketersediaan lahan sarana dan prasarana umum serta menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
3. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata;
4. Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan kompetensi;
5. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten;
6. Belum optimalnya pelayanan transportasi laut dan manajemen pengelolaan pariwisata;
7. Penanganan pengelolaan sampah, sanitasi permukiman, dan drainase yang belum optimal;
8. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis.

BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan tersebut adalah :

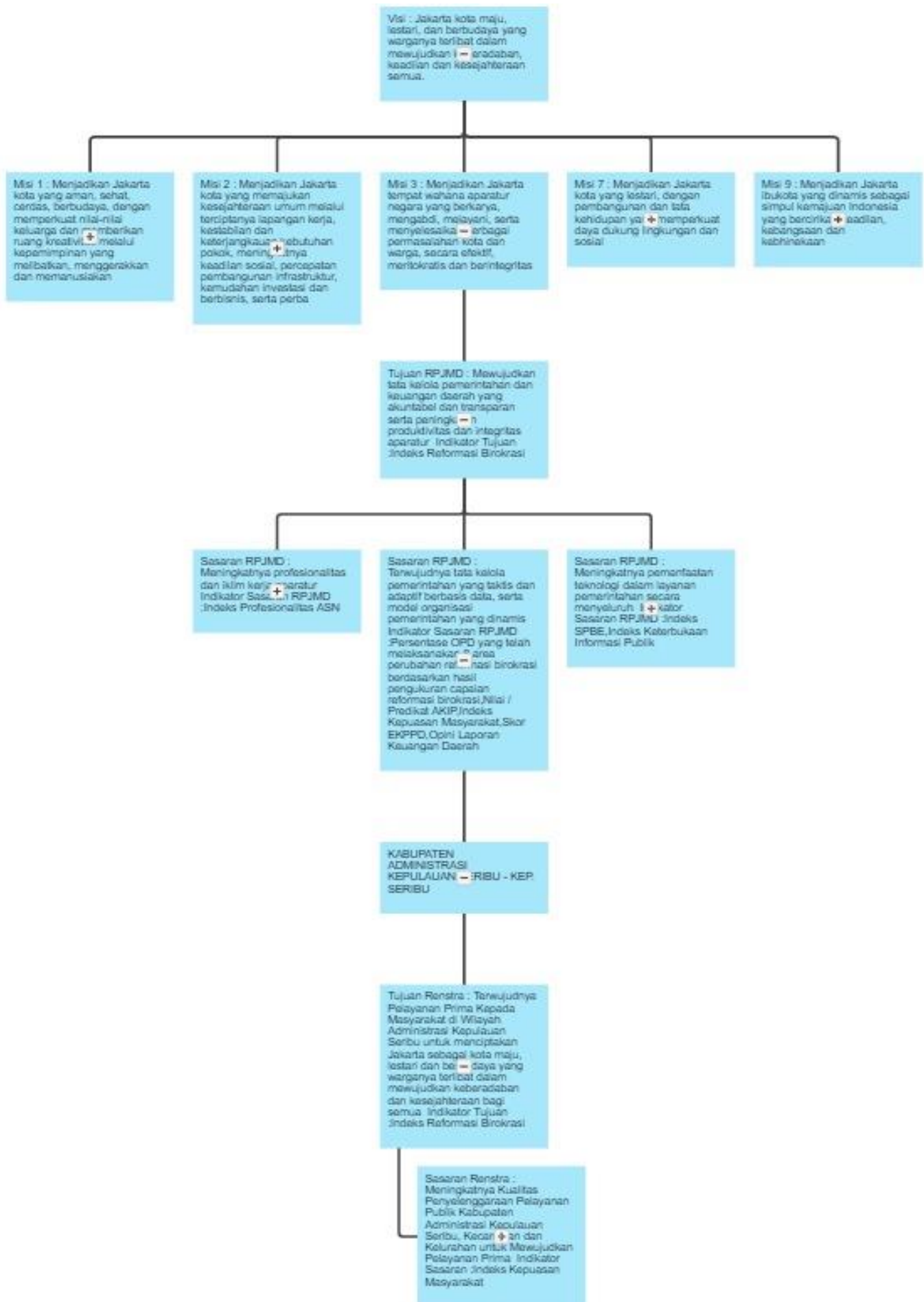
"Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu Untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua."

Sasaran

Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi acuan dalam pengukuran program dan kegiatan periode 2017-2022.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tercantum dalam diagram berikut.



Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini kemudian dilakukan dibuat Penetapan Perjanjian Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja 2021 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja 2021 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja secara efektif, efisien dan konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam misi pencapaian visi dan misi organisasi. Sekaligus merupakan acuan dan bahan rujukan bagi proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional seluruh satker Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2021.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Jumlah keseluruhan mencapai 19 Indikator Kinerja. Berikut ditampilkan Penetapan Perjanjian Kinerja beserta target kinerjanya.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Sasaran Strategis							
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tulus melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan	N/A	N/A	N/A	91%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$				
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (Nomor 51)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (Nomor 51)	100%	100%	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air	100%	100%	N/A	N/A

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
		Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu nomor (52)	Limbah di Kepulauan Seribu (nomor 52)				
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A
8	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%
Sasaran Khusus							
9	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian	N/A	3	N/A	N/A

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))				
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template <i>communication plan</i> mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan*Verifikasi <i>communication plan</i> dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfo menyusun <i>calendar of events</i> dan <i>communication tools standard</i> di level Provinsi.c) Persentase penyusunan list potensi	N/A	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfo per triwulan .d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.				
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (81)
Sasaran Operasional							
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
15	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%

BAB 3

Data Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjelaskan tentang capaian indikator kinerja organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat 19 (sembilan belas) sasaran kinerja yang terbagi menjadi sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus. Sasaran strategis memuat Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan KSD yang diampu oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sasaran Khusus memuat Pemanfaatan E-Order, Opini Laporan Keuangan Daerah, Strategi Komunikasi dan Predikat SAKIP. Sedangkan untuk Sasaran Operasional memuat Penyelesaian Tindak Lanjut Arahkan Gubernur, Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, Nilai Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK.

Tabel berikut akan membandingkan data capaian kinerja di Tahun 2021 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, juga membandingkannya dengan target RPJMD dan Standar Nasional (bila ada). Perbandingan ini akan memperjelas posisi capaian yang ada di Tahun 2021 dan memberi informasi mengenai trend dari kondisi capaian beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3a. Perjanjian Kinerja, Realisasi, Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	85	N/A	N/A	N/A	N/A	85
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	86	87,72	86,08	83,64	86,01	88
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91%	92,23%	94,31%	90,01%	92,88%	91%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Terpadu (Nomor 20)						
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nomor 38)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 51)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (Nomor 51)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
8	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Air Limbah di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 52)	Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (Nomor 52)						
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (KSD Nomor 63)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Nomor 66)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang	100%	88,41%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut						
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional baadn pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3 (100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD	100%	100%	100%	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			masing-masing. Diskominfoetik menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfoetik per triwulan. d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.						
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	81	94,22	N/A	N/A	N/A	81

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018	Target RPJMD Tahun Ke-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%	100%	100%	100%	87,5%	N/A
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	93	89,81	92,4	N/A	N/A	N/A
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A

Tabel 3b Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Wilayah Kota Administrasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Target Kinerja Sasaran Kota/Kabupaten Administrasi					
			Kep 1000	JP	JB	JS	JT	JU
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,72	91,63	90,62	91,28	92,82	93,85
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	92,23%	96,24%	89,63%	96,6%	91,91%	91%

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- Realisasi Capaian vs Target
Sampai dengan laporan ini dibuat, hasil penilaian IRB yang dilakukan oleh Kemenpanrb belum keluar sehingga tidak dapat diukur capaiannya (capaian N/A).
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun sebelumnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat target ini, sehingga data capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-4 yaitu sebesar 85. Dikarenakan hasil penilaian IRB yang dilakukan oleh Kemenpanrb belum keluar sehingga tidak dapat diukur capaiannya.
- Perbandingan dengan Wilayah Kota Administrasi
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks ini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2021 targetnya adalah 86 sedangkan realisasinya sebesar 87,72 sehingga capaiannya adalah 100%. Pada Tahun 2021 pelaksanaan survey pengukuran IKM dilakukan terhadap 2 jenis pelayanan saja dari idealnya 6 pelayanan diakrenakan kondisi pandemi Covid-19.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Nilai indeks ini lebih tinggi dari targetnya, bahkan capaiannya melampaui jauh diatas target dengan trend dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-4 yaitu sebesar 88. Hasil yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 87,72 dimana masih dibawah target pada RPJMD namun melihat dari trend yang ada maka kami optimis target pada akhir periode RPJMD yaitu pada Tahun 2022 sebesar 88,5 akan tercapai.

- Perbandingan Dengan Kota Administrasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih nilai sebesar 87,72% yang masuk kedalam predikat Baik hal ini karena kurangnya sosialisasi tentang persyaratan pada masing-masing jenis pelayanan yang dilakukan secara intens kepada masyarakat, dibanding wilayah Kota Administrasi yang sudah mendapat predikat Sangat Baik.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan 3 komponen yaitu penyerapan anggaran, efisiensi anggaran dan pencapaian output.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2021 capaian nilai ini mencapai 92,23% dari target 91% sehingga capaiannya adalah 100%. Meskipun terdapat refocussing pada Tahun 2021, namun seluruh program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik walaupun anggarannya dipangkas maupun ditiadakan.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada Tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, capaiannya lebih tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2021 ini banyak efisiensi pada kegiatan fisik, sedangkan pada tahun 2020 hampir seluruh kegiatan

fisik tidak dilaksanakan karena difocusing karena anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini target RPJMD pada tahun ke-4 yaitu sebesar 91%. Berdasarkan data pada tabel, pada tahun 2021 capaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 92,23%, sehingga target pada RPJMD sudah terpenuhi.

- Perbandingan Dengan Kota Administrasi

Berdasarkan nilai rata-rata dari keseluruhan lima Kota dan satu Kabupaten yaitu sebesar 93,28%, bahwa penyerapan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah cukup baik terlihat dari capaiannya yang diatas rata-rata wilayah yaitu sebesar 94,32%

4. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 20

Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dengan renaksi yaitu pelaksanaan sosialisasi pendaftaran kewirausahaan terpadu di kelurahan yang dapat diselesaikan sesuai target dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020 dan 2019, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

5. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 38

Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan renaksi penyerahan dokumen BAST Fasos Fasum ke BPAD selaku PPAD beserta tagging ke sistem JakartaSatu/SiPRAJA telah diselesaikan sesuai target dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

6. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 39

Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA. Adapun renaksinya adalah Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah selesai sesuai dengan kriteria ketuntasan dan dengan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan

pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

7. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 51

Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu dengan renaksi Kejelasan Lahan Lokasi Rencana Pembangunan IPA di Pulau Pari yang telah diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

8. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 52

Persentase Penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu dengan renaksi Inventarisasi Lahan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Penduduk yang belum terlayani SPALD. Target renaksi ini telah memenuhi kriteria ketuntasan dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Sedangkan pada Tahun 2020, 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

9. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 61

Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dengan renaksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021 yang telah diselesaikan tuntas dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

10. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 63

Persentase penyelesaian Implementasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan renaksi Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

11. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 66

Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan dengan renaksi Persetujuan Lokasi Penataan Kawasan TA 2021 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat diselesaikan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020 dan 2019, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

12. Persentase Pemanfaatan e-Order

Pengukuran jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2021 jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp. 306.948.392, adapun realisasinya senilai Rp. 271.358.000 dan sisa anggaran senilai Rp. 35.590.392. Sehingga capaiannya 88.41%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada Tahun 2020 capaiannya adalah 100%, sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

13. Opini Laporan Keuangan Daerah

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. Pengukuran indikator ini merupakan tanggung jawab kolektif dalam upaya mendukung pencapaian predikat WTP Provinsi DKI Jakarta.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020, 2019 dan 2018, indikator ini capaiannya juga 100% dengan diperolehnya WTP oleh tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

14. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik

Pengukuran persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh dokumen yang menjadi data pendukung tercapainya pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik telah dibuat dan diupload kedalam sistem tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

15. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Pengukuran dilakukan dengan perolehan Nilai/Predikat minimal A dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target nilai untuk tahun 2021 adalah 81, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mendapatkan nilai 94,22. Seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini Tahun 2020, 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

16. Persentase Progres TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal

Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Temuan yang menjadi target untuk diselesaikan sebanyak 1 temuan yaitu Terdapat

Saldo Rekening per 31 Desember 2020 atas nama Dewan Kelurahan, Satgas Kelurahan dan KJK-PEMK Tidak Aktif senilai Rp2.768.760.465,00 yang Belum Disetorkan Ke Kas Daerah. Terhadap temuan tersebut sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan dan diselesaikan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020 dan 2019 indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 capaiannya adalah 87,5%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

17. Survey Kepuasan Masyarakat

Pengukuran dilakukan dengan menghitung hasil jawaban pada kuesioner Jaksurvey dari para responden yang telah ditentukan sebelumnya. Responden berasal dari para ketua RT, ketua RW, LMK, FKDM, Forkopimda, TP-PKK dan lainnya pada setiap masing-masing tingkatan wilayah.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2021 adalah 93 dan capaiannya adalah 89,81 sehingga capaiannya 96.5%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kegiatan pada Tahun 2021 difokuskan pada kegiatan non fisik untuk menanggulangi pandemic, sehingga dampak nyata dari pembangunan kurang begitu terlihat. Faktor berikutnya adalah karena beberapa responden yang kami minta saran dan pendapatnya mengungkapkan bahwa mereka memilih jawaban dengan kurang memahami pertanyaan pada kuesioner sehingga ketika ada pertanyaan negatif dijawab dengan pilihan sangat baik, yang justru kontradiksi dengan niatan dari para responden.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 92.4. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

18. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (capaian 100%)

Pengukuran dilakukan dengan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2021, jumlah aduan yang masuk sebanyak 39 aduan. Seluruh aduan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020 dan 2019, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

19. Persentase Penyelesaian TL Arahan Gubernur

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) yang diselesaikan dengan Jumlah keseluruhan TL Arahan Gubernur yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah

ditentukan. Sehingga capaiannya 100%. Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) TL Arahan Gubernur yang masuk dan telah diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2020 dan 2019, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dapat terlihat melalui efisiensi sumber daya keuangan yang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - [\text{realisasi biaya} / \text{target biaya} \times 100\%]$$

Tingkat efisiensi dapat dihitung manakala target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dapat diukur (N/A). Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2021 pada tabel dibawah.

Tabel 4. Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	93.85%	6.15%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	92,23%	7.77%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	100%	100%	0%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100%	96,26%	3.74%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	100%	98,13%	1.87%
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 51)	100%	96.26%	3.74%
8	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 52)	100%	96.26%	3.74%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100%	96.26%	3.74%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	100%	96.26%	3.74%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	akuntabel serta bebas teknologi informasi	(KSD Nomor 63)			
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD Nomor 66)	100%	100%	0%
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	88,41%	88,41%	N/A
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	100%	96.26%	3.74%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	96,61%	3.39%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	100%	98,13%	1.87%
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	98,13%	1.87%
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	96.56%	96,26%	N/A
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	96,26%	3.74%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
19	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	96,26%	3.74%

Salah satu faktor yang mendukung tingginya penyerapan anggaran adalah adanya APBD perubahan yang ditetapkan di triwulan terakhir. Dengan adanya perubahan ini, maka anggaran yang mengalami keterlambatan (SPD turun kegiatan selesai dilaksanakan), anggaran untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (rapat koordinasi menggunakan zoom meeting) dan kegiatan yang terkena refocusing bisa disesuaikan.

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki beberapa Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, antara lain Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %, Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum, Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :
 - Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki Indikator yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu Indikator Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi > 80 %.

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi.
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - Program Pengelolaan Kecamatan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Kualitas penggunaan anggaran adalah seluruh program yang diampu oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 20
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 20 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator persentase jumlah wirausaha baru yang tercapai dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Jumlah kawasan yang tertata.
5. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 38
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 38 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

6. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 39
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 39 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).
7. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 51
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 61 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
8. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 52
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 61 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
9. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 61
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 61 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
10. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 63
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 63 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
11. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 66
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 66 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.
12. Persentase Pemanfaatan e-Order
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja pemanfaatan e-order adalah semua program dengan komponen makan minum rapat.
13. Opini Laporan Keuangan Daerah

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
14. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja implementasi rencana strategis komunikasi publik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Predikat SAKIP Perangkat Daerah
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Capaian predikat SAKIP adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).
16. Persentase Progres TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Capaian predikat SAKIP adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).
17. Survey Kepuasan Masyarakat
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
18. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

19. Persentase Penyelesaian TL Arahan Gubernur

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 15 (lima belas) program yang menjadi target pelaksanaan. 7 (tujuh) program merupakan sasaran utama yang memiliki Indikator Sasaran RPJMD sama yaitu Indikator Kepuasan Masyarakat. Sedangkan 8 (delapan) lainnya merupakan program pelimpahan kewenangan. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing program yang mendukung capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 5. Program Yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%	92.502.068.912	89.926.997.232	97,22%
		Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	3 Gedung	3 Gedung	100%	9.931.965.555	8.472.464.963	85,31%

2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	N/A	N/A	2.204.186.143	1.931.827.300	87,64%
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	277.179.770	236.053.000	85,16%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Indeks	4 Indeks	100%	26.417.603.200	25.997.222.895	98,41%
5	Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95%	100%	100%	378.000.000	378.000.000	100,00%
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	95%	95,83%	100%	5.742.499.762	5.517.920.662	96,09%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Kecamatan	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.582.694.241	7.106.258.554	93,72%
		Indeks Kepuasan Terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Taman dan Makam di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	27.753.821.024	25.868.945.743	93,21%
6	Program Pengelolaan Kota	Indeks kepuasan pelayanan	4	4	100%	5.501.378.550	4.704.170.195	85,51%

	Administrasi	kendaraan operasional	Indeks	Indeks				
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol	4 Indeks	4 Indeks	100%	518.841.272	367.048.000	70,74%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	95	100	100%	0	0	-
			Persen	Persen				
7		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	95 Persen	100 Persen	100%	0	0	-
		Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	90%	98,46%	100%	0	0	-
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	95%	100%	100%	3.600.000	0	0,00%
8	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Persentase Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi yang terselesaikan	90 Persen	100 Persen	100%	168.000.000	168.000.000	100,00%
		Jumlah Kawasan yang Tertata	N/A Kawasan	N/A Kawasan	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	90 Persen	100 Persen	100%	0	0	-
		Persentase Terselesaikannya	90	100	100%	4.200.000	4.200.000	100,00%

		Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Sehat	Persen	Persen				
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	100%	0	0	-
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	86	N/A	N/A	27.352.740	24.616.600	90,00%
			Nilai					
		Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten	95%	100%	100%	0	0	-
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	95%	100%	100%	0	0	-
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	95%	100%	100%	302.151.500	290.860.000	96,26%
9	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	90 Persen	100 Persen	100%	393.600.000	371.775.000	94,46%
10	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	70%	80%	100%	707.595.157	506.165.698	71,53%
11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penyelenggaraan Pencahayaan Jalan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.002.319.392	4.932.202.040	70,44%

12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	260.521.595	243.589.000	93,50%
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	264.178.276	255.016.590	96,53%
14	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	881.535.330	866.781.678	98,33%
15	Program Penanganan Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penanganan Bencana	4 Indeks	4 Indeks	100%	124.832.640	49.764.000	39,86%
16	Program Rehabilitasi Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	-
TOTAL					100%	188.950.125.059	178.219.879.150	94,32%

Seluruh Indikator Sasaran tersebut dipantau dan dievaluasi progresnya oleh setiap Unit Kerja dari tingkat Sekretariat sampai dengan Kelurahan yang membidangi urusannya sehingga target bisa tercapai sesuai perencanaan. Berdasarkan data diatas maka dapat terlihat adanya efisiensi anggaran sebesar 5.68% di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2021.

Realisasi Anggaran

Secara detail, data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan 4 (empat) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini

Tabel 6. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	92.502.068.912	89.926.997.232	97,22%	
		Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	3 Gedung	3 Gedung	100%	Sangat Tinggi	9.931.965.555	8.472.464.963	85,31%	
B.7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	N/A	N/A	-	2.204.186.143	1.931.827.300	87,64%	Kesepakatan Hasil Rapat dengan Biro ORB pada tanggal 23 September 2021 : - Pelaksanaan SKM Kota/

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Kabupaten Adm. Tahun 2021 dilaksanakan hanya pada 2 bidang yaitu Bidang Ketertiban Umum dan PPSU. - Mengingat kondisi Pandemi COVID-19 maka SKM Jumentik, Posyandu dan PKK tidak dilakukan.
B.7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	277.179.770	236.053.000	85,16%	SKM Ketertiban Umum
B.7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	26.417.603.200	25.997.222.895	98,41%	SKM PPSU, Ruang Interaksi Warga dan

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Publik	Publik								Musrenbang
A.7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95%	100%	100%	Sangat Tinggi	378.000.000	378.000.000	100,00%	
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	95%	95,83%	100%	Sangat Tinggi	5.742.499.762	5.517.920.662	96,09%	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Kecamatan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	7.582.694.241	7.106.258.554	93,72%	
		Indeks Kepuasan Terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Taman dan Makam di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	27.753.821.024	25.868.945.743	93,21%	
A.7.02.02	Program Pengelolaan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	5.501.378.550	4.704.170.195	85,51%	

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kota Administrasi									
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	518.841.272	367.048.000	70,74%	
		Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	95 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Terelesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	95 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	90%	98,46%	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	95%	100%	100%	Sangat Tinggi	3.600.000	0	0,00%	

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi yang terselesaikan	90 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	168.000.000	168.000.000	100,00%	
A.7.03.02	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Jumlah Kawasan yang Tertata	N/A Kawasan	N/A Kawasan	N/A	-	N/A	N/A	N/A	Tidak Ada Target 2021
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	90 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Sehat	90 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	4.200.000	4.200.000	100,00%	
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	86 Nilai	N/A	N/A	-	27.352.740	24.616.600	90,00%	Sesuai Surat Dirjen Kemenkumham Nomor: HAM-HA.02.02-17 untuk sementara program/ kegiatan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan.
		Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten	95%	100%	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	95%	100%	100%	Sangat Tinggi	0	0	-	Tanpa Anggaran
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	95%	100%	100%	Sangat Tinggi	302.151.500	290.860.000	96,26%	

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	90 Persen	100 Persen	100%	Sangat Tinggi	393.600.000	371.775.000	94,46%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	70%	80%	100%	Sangat Tinggi	707.595.157	506.165.698	71,53%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penyelenggaraan Pencahayaan Jalan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	7.002.319.392	4.932.202.040	70,44%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	260.521.595	243.589.000	93,50%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan TW 4 (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	264.178.276	255.016.590	96,53%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	881.535.330	866.781.678	98,33%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penanganan Bencana	4 Indeks	4 Indeks	100%	Sangat Tinggi	124.832.640	49.764.000	39,86%	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
B.1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0	0	-	Program Tambahan (Urusan Pelimpahan)
TOTAL					100%	Sangat Tinggi	188.950.125.059	178.219.879.150	94,32%	

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas, dapat diketahui bahwa dari total 31 Indikator Kinerja Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan-4 Tahun Anggaran 2021, terdapat **28 Indikator Kinerja Program yang realisasinya mencapai 100% (Predikat Interpretasi Sangat Tinggi)**. Selain itu terdapat 1 Indikator Kinerja Program yang tidak ada target di Tahun 2021 yakni "Jumlah Kawasan yang Tertata" (N/A). Namun terdapat **2 Indikator Kinerja Program Triwulan-4 yang realisasinya tidak dapat diukur (N/A)** yakni :

1. Indikator Kinerja Program ***"Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu"***. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terhadap kegiatan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Kelurahan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) pada tanggal 23 September 2021, yang menyepakati bahwa sehubungan dengan masih tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, dan penerapan status PPKM Level 4 di Provinsi DKI Jakarta, telah disepakati terkait dengan Pelaksanaan SKM Kota/Kabupaten Administrasi dilaksanakan hanya pada 2 bidang yaitu Bidang Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan PPSU.
2. Indikator Kinerja Program ***"Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia"***. Sesuai Surat Direktur Jenderal KEMENKUMHAM Nomor: HAM-HA.02.02-17 untuk sementara program/kegiatan pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan.

Apabila diperhatikan dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan-4, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja keuangan. Sub kegiatan

tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dalam mencapai target keluaran (output). Hal ini dapat berpotensi terhadap rendahnya capaian Indikator Program dari Sub Kegiatan tersebut apabila SPD sub kegiatannya tidak diterbitkan.

Begitu pula dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat pengadaan, pemeliharaan, pekerjaan fisik, konstruksi, jasa konsultan dan lain-lain, realisasi target kinerja output dan outcome nya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus sebagai prioritas utama dalam penyediaan/penerbitan dananya (SPD) pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sehingga RENSTRA dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

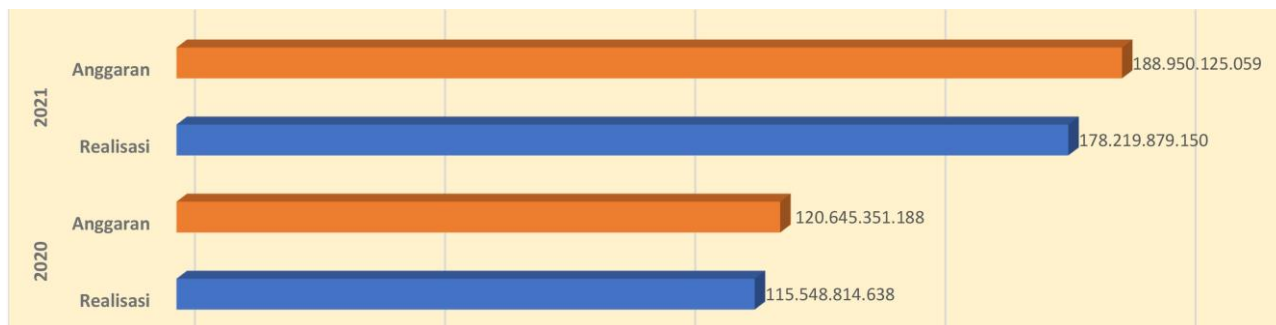
Kemudian terkait program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran maka apabila anggarannya tidak dapat dicairkan maka masih tetap dapat menghasilkan output dan outcome. Target kinerja output dan outcome yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Selanjutnya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026 antara lain :

1. Memetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026;
2. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta berdasarkan skala prioritas;
3. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal; dan

Memperhatikan hal-hal teknis dan administratif setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen belanja yang akan diusulkan dalam Renja.

Pada tahun 2020, anggaran yang diterima paling rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 120.645.351.188. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020



Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020-2021

Berdasarkan Grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2020-2021 rata-rata realisasi anggaran meningkat menjadi sekitar 95,65 persen. Oleh karena itu, realisasi anggaran untuk ke depannya diharapkan tetap tinggi agar target kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

BAB **4** **Penutup**

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2021 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Program dan kegiatan Tahun 2021 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja selama tahun 2021 ini maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlihat upaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung Kabupaten.
3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada peningkatan capaian berbagai indikator kinerja utama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
4. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan karena kondisi pandemi Covid-19.

Saran

1. Meningkatkan komitmen antar SKPD dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja serta money capaian kinerjanya secara periodik.

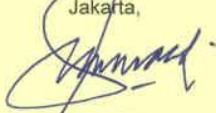
2. Mengedukasi masyarakat tentang pencapaian program-program pemerintah agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terkomunikasikan dengan baik di masyarakat luas.

Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membuat strategi komunikasi yang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pemahaman masyarakat mengenai program pemerintah dapat terinformasikan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021 ini dapat menyempurnakan akuntabilitas dan sekaligus masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: JUNAEDI
Jabatan	: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta,	2021
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	JUNAEDI NIP 196612051987031003

Lampiran 2 Penghargaan Survei Kepuasan Masyarakat Tertinggi



Lampiran 3 Penghargaan Desa Wisata



Lampiran 4 Penghargaan MTQ

